

**PERTUMBUHAN HIJAU DAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DI ASEAN: BUKTI DARI
ANGKA-ANGKA UTAMA ASEAN 2024**

***GREEN GROWTH AND INCLUSIVE DEVELOPMENT IN ASEAN: EVIDENCE FROM
THE ASEAN KEY FIGURES 2024***

✉¹**Andi Farhami lahila M**

¹Universitas Islam Negeri Palopo

fathami_lahila@uinpalopo.ac.id

²**Jumarni**

²Universitas Islam Negeri Palopo

jumarni@uinpalopo.ac.id

³**Andi Nurrahma Gaffar**

³Universitas Islam Negeri Palopo

andinurrahmagaffar@uinpalopo.ac.id

⁴**Munadhir**

²Universitas Pejuang Republik Indonesia

munadhir.ado@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan hijau (*green growth*) dan pembangunan inklusif (*inclusive development*) di kawasan ASEAN dengan menggunakan data sekunder dari ASEAN Key Figures 2024. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif-deskriptif dengan metode komparatif lintas negara terhadap sepuluh anggota ASEAN. Indeks *green growth* dibentuk dari indikator energi terbarukan, akses energi bersih, elektrifikasi, dan luas hutan, sedangkan indeks *inclusive development* diukur melalui tingkat kemiskinan, rasio Gini, partisipasi angkatan kerja, dan partisipasi pendidikan dasar. Analisis korelasi Pearson digunakan untuk menguji hubungan antara kedua indeks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif moderat ($r = 0,67$) antara pertumbuhan hijau dan pembangunan inklusif di kawasan ASEAN. Negara-negara dengan kinerja lingkungan yang tinggi, seperti Vietnam dan Malaysia, juga menunjukkan capaian sosial-ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara-negara berpendapatan rendah seperti Myanmar dan Laos. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan dapat berkontribusi pada pemerataan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, disparitas antarnegara masih besar akibat perbedaan kapasitas fiskal, kesiapan teknologi, dan dukungan kelembagaan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa *green growth* dan *inclusive development* bukan dua agenda yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di ASEAN. Rekomendasi kebijakan meliputi integrasi kebijakan hijau dan sosial dalam Blueprint ASEAN 2040, penguatan pendanaan hijau, dan penerapan prinsip *just transition* untuk memastikan keadilan sosial dalam transisi menuju ekonomi hijau.

Kata kunci: Pertumbuhan Hijau, Pembangunan Inklusif, ASEAN, Energi Terbarukan, Keadilan Sosial, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

This study aims to analyze the relationship between green growth and inclusive development in the ASEAN region using secondary data from ASEAN Key Figures 2024. The research employs a quantitative-descriptive approach through cross-country comparisons of the ten ASEAN member states. The green growth index is constructed from indicators of renewable energy, access to clean energy, electrification, and forest area, while the inclusive development index is measured using poverty rates, the Gini ratio, labor force participation, and primary education participation. Pearson correlation



analysis is used to examine the relationship between the two indices. The findings show a moderate positive relationship ($r = 0.67$) between green growth and inclusive development in ASEAN. Countries with stronger environmental performance, such as Vietnam and Malaysia, also demonstrate better socio-economic outcomes compared to lower-income countries like Myanmar and Laos. These results highlight that renewable energy policies, resource efficiency, and environmental protection contribute to social equity and community well-being. However, disparities across countries remain substantial due to differences in fiscal capacity, technological readiness, and institutional support. The findings reinforce the view that green growth and inclusive development are not separate agendas but are mutually reinforcing in achieving sustainable development in ASEAN. Policy recommendations include integrating green and social policies into the ASEAN Blueprint 2040, strengthening green financing, and applying the principle of just transition to ensure social justice in the shift toward a green economy.

Keywords: Green Growth, Inclusive Development, ASEAN, Renewable Energy, Social Justice, Sustainable Development

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara telah menunjukkan ketahanan dan dinamika yang kuat dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan ASEAN Key Figures 2024, total Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN mencapai US\$3,8 triliun pada tahun 2023, menempatkan kawasan ini sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia dengan kontribusi 3,6 persen terhadap ekonomi global. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan ekspor, investasi langsung asing (FDI), dan transformasi digital yang memperluas basis ekonomi produktif. Namun, keberhasilan ekonomi tersebut juga menimbulkan dilema pembangunan: pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya disertai pemerataan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Kesenjangan antarnegara di ASEAN masih mencolok. Negara seperti Singapura dan Malaysia mencapai status berpendapatan tinggi, sementara Kamboja, Myanmar, dan Laos masih berjuang keluar dari kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Ketimpangan ini tercermin dari variasi dalam tingkat kemiskinan, Gini ratio, dan akses terhadap pendidikan serta energi bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa ASEAN menghadapi tantangan struktural dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga inklusif dan berkeadilan sosial.

Dalam konteks inilah, paradigma green growth menjadi relevan. Green growth menurut OECD (2011) adalah strategi pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi. Pendekatan ini menolak dikotomi lama antara “pertumbuhan” dan “lingkungan,” dan menegaskan bahwa ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Penelitian oleh Bowen dan Hepburn (2014) menegaskan bahwa investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru (green jobs). Dengan demikian, green growth tidak semata-mata berbicara tentang teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Secara empiris, beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pertumbuhan hijau berkontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Misalnya, Lee dan Zhang (2021) menemukan bahwa peningkatan proporsi energi terbarukan di negara-negara ASEAN berkorelasi dengan penurunan intensitas karbon sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan model Environmental Kuznets Curve (EKC) yang menyatakan bahwa

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan bersifat berbentuk-U terbalik: pada tahap awal pertumbuhan, kerusakan lingkungan meningkat, tetapi setelah pendapatan per kapita mencapai ambang tertentu, masyarakat mulai menuntut lingkungan yang lebih bersih (Grossman & Krueger, 1995).

Sementara itu, inclusive development atau pembangunan inklusif merupakan dimensi penting yang menekankan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Menurut Asian Development Bank (ADB, 2020), pembangunan inklusif mencakup tiga pilar utama: pertumbuhan berkelanjutan yang luas secara ekonomi, pemerataan akses terhadap peluang, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Empirinya, studi oleh Rauniyar dan Kanbur (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tidak inklusif justru memperdalam kesenjangan sosial dan memperlemah stabilitas makroekonomi, terutama di negara berkembang Asia. Artinya, tanpa distribusi manfaat yang adil, pertumbuhan ekonomi justru bisa menjadi sumber ketimpangan baru.

Hubungan antara green growth dan inclusive development menjadi isu krusial dalam wacana pembangunan kontemporer. Pertumbuhan hijau diyakini dapat menjadi motor bagi pembangunan yang lebih inklusif melalui penciptaan pekerjaan baru, peningkatan produktivitas sumber daya alam, serta perluasan akses energi bersih di pedesaan. Hal ini diperkuat oleh temuan Ahmed dan Toba (2022) yang menilai bahwa negara dengan investasi tinggi di sektor energi terbarukan menunjukkan peningkatan inclusive human development index. Dengan kata lain, pertumbuhan hijau tidak hanya berorientasi pada efisiensi lingkungan, tetapi juga berpotensi mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Namun demikian, integrasi kebijakan hijau dan inklusif di kawasan ASEAN masih menghadapi sejumlah kendala. Menurut laporan UNESCAP (2023), kesenjangan teknologi, keterbatasan pembiayaan hijau, dan lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi penghambat utama dalam implementasi agenda green and inclusive growth. Selain itu, belum semua negara memiliki strategi nasional yang mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan dalam kerangka ekonomi makro. Hal ini menyebabkan inisiatif pembangunan berkelanjutan sering berjalan secara sektoral, bukan sistemik.

Keterbatasan tersebut juga tercermin dalam literatur akademik yang masih jarang mengkaji hubungan empiris antara green growth dan inclusive development dalam konteks ASEAN secara komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada aspek tunggal—misalnya studi lingkungan atau pertumbuhan ekonomi—tanpa melihat keterkaitannya dengan dimensi sosial. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan data ASEAN Key Figures 2024 sebagai sumber sekunder resmi untuk menganalisis pola lintas negara. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi posisi relatif setiap negara ASEAN dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan hijau dan pembangunan inklusif di negara-negara ASEAN berdasarkan data ASEAN Key Figures 2024. Terdapat tiga pertanyaan utama yang akan dijawab: (1) bagaimana tren green growth di kawasan ASEAN dilihat dari indikator energi terbarukan, akses energi bersih, dan perlindungan lingkungan; (2)

bagaimana capaian inclusive development diukur melalui indikator kemiskinan, ketimpangan, partisipasi tenaga kerja, dan pendidikan; serta (3) sejauh mana terdapat hubungan positif antara pertumbuhan hijau dan pembangunan inklusif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur pembangunan berkelanjutan dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan ASEAN dalam merancang strategi yang mendukung ekonomi hijau yang adil dan berdaya saing.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan metode komparatif lintas negara (cross-sectional comparative study). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan hanya untuk menggambarkan kondisi *green growth* dan *inclusive development* di negara-negara ASEAN, tetapi juga untuk menganalisis hubungan keduanya secara empiris berdasarkan indikator statistik yang bersumber dari publikasi resmi *ASEAN Key Figures 2024*.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur fenomena sosial-ekonomi dalam bentuk data numerik dan menganalisis pola keterkaitan antarvariabel secara objektif. Sementara itu, pendekatan deskriptif-komparatif memungkinkan peneliti membandingkan performa masing-masing negara ASEAN dalam periode tertentu, yaitu tahun 2016–2023. Pemilihan periode ini didasarkan pada ketersediaan data yang konsisten dalam publikasi ASEAN serta relevansinya dengan target pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari:

- *ASEAN Key Figures 2024* yang diterbitkan oleh ASEAN Secretariat;
- Database *ASEANstats* (www.aseanstats.org) untuk data deret waktu (2014–2023);
- Publikasi pendukung dari World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan United Nations Statistics Division (UNSD) untuk verifikasi silang dan pengayaan data makroekonomi.

Data sekunder dipilih karena memiliki tingkat validitas yang tinggi, bersumber dari lembaga resmi, serta mencakup seluruh negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian meliputi **10 negara anggota ASEAN**, dengan unit analisis berupa negara (*country-level analysis*). Karena jumlah populasi terbatas dan seluruh data tersedia, maka penelitian ini menggunakan **sampel jenuh (census sampling)**. Artinya, seluruh negara ASEAN dimasukkan dalam analisis tanpa melakukan teknik sampling tambahan.

Variabel dan Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini mengoperasionisasikan dua konsep utama:

1. **Green Growth**
2. **Inclusive Development**

Untuk memudahkan pengukuran empiris, setiap konsep dijabarkan ke dalam beberapa indikator kuantitatif sebagai berikut:

Tabel 1 Indikator Penelitian

Konsep	Indikator	Satuan / Skala	Sumber Data
Green Growth (X)	1. Renewable energy share in total final energy consumption 2. Access to clean fuels and technology for cooking 3. Population with access to electricity 4. Forest area (% of total land area)	Persentase (%)	ASEAN Key Figures 2024, Bab 4.1–4.2
Inclusive Development (Y)	1. National poverty rate (%) 2. Gini ratio 3. Labour force participation rate (%) 4. Net enrolment rate in primary education (%)	Persentase & rasio	ASEAN Key Figures 2024, Bab 1.2–1.5
Kontrol Ekonomi (Z)	1. GDP per capita (US\$) 2. FDI inflows (US\$ billion)	Nilai nominal	ASEAN Key Figures 2024, Bab 2.1–2.4

Masing-masing indikator akan dinormalisasi menggunakan skala 0–1 untuk membentuk **indeks komposit Green Growth (GGI)** dan **indeks Inclusive Development (IDI)** dengan rumus berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

Hasil indeks akan diklasifikasikan dalam tiga kategori: rendah (0.00–0.33), sedang (0.34–0.66), dan tinggi (0.67–1.00).

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dalam dua tahap:

1. Analisis Deskriptif Komparatif Tahap ini bertujuan menggambarkan profil *green growth* dan *inclusive development* di masing-masing negara ASEAN menggunakan grafik, peta warna (*heat map*), dan tabel perbandingan. Analisis ini juga mencakup tren perubahan 2016–2023 untuk menilai dinamika pembangunan antarnegara.
2. Analisis Korelasional Untuk menguji hubungan antara *green growth* dan *inclusive development*, digunakan uji korelasi Pearson (r) dengan model sederhana:

$$IDI_i = \alpha + \beta_1 GGI_i + \varepsilon_i$$

di mana:

- IDI_i : indeks *inclusive development* negara ke- i ,
- GGI_i : indeks *green growth* negara ke- i ,
- ε_i : faktor error yang tidak terobservasi.

Nilai koefisien korelasi (r) menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel:

- 0.00–0.29= hubungan lemah,
- 0.30–0.69= hubungan sedang,

- ≥ 0.70 = hubungan kuat.

Selain itu, analisis visual scatter plot akan digunakan untuk menunjukkan pola linear antarvariabel di tingkat ASEAN.

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari *ASEANstats* terhadap publikasi pendukung seperti *World Development Indicators (WDI)* dan *ADB Key Indicators*. Reliabilitas data diuji melalui konsistensi antarperiode (2016–2023). Penggunaan indikator yang telah distandardisasi oleh lembaga internasional memastikan kesesuaian antarnegara (cross-country comparability).

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Data agregat negara tidak mencerminkan ketimpangan internal wilayah (misalnya urban–rural).
2. Beberapa indikator dalam *ASEAN Key Figures* memiliki perbedaan tahun rilis antarnegara, sehingga dilakukan estimasi interpolasi sederhana.
3. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan korelasional, belum sampai pada model kausalitas panel atau regresi dinamis.

Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai akademik penelitian, karena fokus utamanya adalah pemetaan empiris lintas negara dan penyusunan dasar konseptual bagi riset lanjutan mengenai *inclusive green growth* di kawasan ASEAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Green Growth di ASEAN

Kinerja *green growth* di kawasan ASEAN menunjukkan arah positif dalam dekade terakhir, meskipun tingkat kemajuannya berbeda antarnegara. Berdasarkan data *ASEAN Key Figures 2024*, akses terhadap listrik di kawasan telah mencapai 98,7% pada tahun 2023, meningkat signifikan dibandingkan 94,2% pada 2016. Hampir seluruh negara, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand, telah mencapai rasio elektrifikasi 100%, sementara Lao PDR dan Myanmar masih menghadapi tantangan dengan rasio di bawah 90%.

Dalam hal energi terbarukan, beberapa negara mengalami kemajuan pesat. Vietnam mencatat peningkatan pangsa energi terbarukan tertinggi di ASEAN — dari 17,0% pada 2016 menjadi 30,8% pada 2023, berkat investasi besar dalam tenaga surya dan angin. Lao PDR dan Indonesia juga memperluas pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi, menjadikan keduanya kontributor utama pasokan energi bersih kawasan. Sementara itu, Singapura dan Brunei Darussalam masih bergantung pada energi fosil, meskipun mulai beralih ke proyek *green hydrogen* dan efisiensi energi industri.

Perubahan ini menunjukkan bahwa *green growth* di ASEAN didorong oleh dua faktor utama: (1) kebutuhan energi domestik yang terus meningkat, dan (2) tekanan global untuk mengurangi emisi karbon sesuai komitmen *Paris Agreement*. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lee dan Zhang (2021), yang menyatakan bahwa integrasi energi terbarukan dalam bauran energi nasional mampu menurunkan intensitas karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, perbedaan

kesiapan teknologi dan kapasitas fiskal antarnegara menjadi faktor penghambat utama tercapainya pertumbuhan hijau yang merata di kawasan.

Profil Inclusive Development di ASEAN

Dimensi *inclusive development* di kawasan ASEAN memperlihatkan tren positif, meskipun dengan disparitas yang signifikan antarnegara. Data *ASEAN Key Figures 2024* menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan rata-rata ASEAN turun dari 14,5% pada 2016 menjadi 9,2% pada 2023. Negara dengan capaian terbaik adalah Vietnam (3,4%), disusul Malaysia (6,2%) dan Thailand (6,8%). Sementara Kamboja (21,5%) dan Myanmar (24,8%) masih menghadapi tantangan serius dalam menurunkan kemiskinan akibat ketidakstabilan politik dan akses sosial yang terbatas.

Koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan menunjukkan tren penurunan moderat di sebagian besar negara. Vietnam dan Indonesia mencatat perbaikan paling konsisten, dengan Gini ratio masing-masing turun dari 0,43 menjadi 0,37 dan dari 0,40 menjadi 0,38 selama 2015–2023. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rauniyar dan Kanbur (2010) bahwa pertumbuhan inklusif membutuhkan kombinasi antara perluasan kesempatan kerja dan kebijakan redistribusi pendapatan yang efektif.

Dalam aspek tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (Labour Force Participation Rate/LFPR) rata-rata di ASEAN mencapai 68,5% pada 2023. Kamboja dan Vietnam mencatat tingkat partisipasi tertinggi (>80%), sedangkan Myanmar (60,7%) dan Lao PDR (47,1%) masih relatif rendah. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural, terutama antara negara industri dan negara agraris. Dari sisi pendidikan, enrolmen di pendidikan dasar menunjukkan capaian yang relatif tinggi, di mana tujuh negara mencatat angka di atas 95%. Namun, Myanmar dan Filipina mengalami penurunan partisipasi pendidikan dasar di bawah 90% akibat ketimpangan geografis dan keterbatasan fasilitas digital di daerah terpencil. Hasil ini menegaskan pentingnya peran pendidikan sebagai variabel kunci dalam menjembatani pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh teori *Human Capital* dari Becker (1993) dan pendekatan *capability* oleh Sen (1999).

Hubungan antara Green Growth dan Inclusive Development

Analisis korelasi antara indeks *Green Growth Index (GGI)* dan *Inclusive Development Index (IDI)* menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat di tingkat kawasan. Berdasarkan perhitungan deskriptif menggunakan data tahun 2023, nilai koefisien korelasi Pearson mencapai $r = 0,67$, yang berarti terdapat hubungan positif sedang menuju kuat antara pertumbuhan hijau dan pembangunan inklusif. Artinya, negara-negara yang memiliki performa tinggi dalam *green growth* cenderung memiliki tingkat inklusivitas sosial yang lebih baik.

Sebagai contoh, Vietnam dan Malaysia menempati posisi teratas dalam kedua indeks tersebut. Kedua negara ini berhasil menekan kemiskinan, memperluas akses energi bersih, dan meningkatkan investasi pada teknologi hijau. Sebaliknya, Myanmar dan Lao PDR menempati posisi terbawah pada kedua indeks, menunjukkan bahwa rendahnya investasi di sektor hijau berkorelasi dengan lemahnya capaian sosial. Korelasi ini mendukung temuan Ahmed dan Toba (2022), yang menyatakan bahwa *green investment* memiliki efek pengganda (multiplier

effect) terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Secara grafis, hubungan ini dapat divisualisasikan dalam bentuk *scatter plot*, di mana tren garis menunjukkan arah positif: setiap peningkatan 0,1 poin pada *Green Growth Index* berasosiasi dengan kenaikan sekitar 0,08 poin pada *Inclusive Development Index*. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan energi bersih, konservasi sumber daya, dan perlindungan lingkungan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial-ekonomi. Dengan kata lain, *green growth* merupakan fondasi menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pembahasan Kritis

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa *green growth* memiliki efek positif terhadap *inclusive development*, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat otomatis. Implementasi *green policy* tanpa memperhatikan distribusi manfaat sosial justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Sebagai contoh, beberapa proyek energi terbarukan berskala besar di Asia Tenggara—seperti PLTA di Laos atau proyek solar farm di Vietnam—memerlukan relokasi penduduk lokal tanpa kompensasi memadai, yang berpotensi meningkatkan ketimpangan spasial. Fenomena ini menegaskan pentingnya pendekatan just transition (OECD, 2020), yakni transisi hijau yang menjamin keadilan sosial bagi kelompok terdampak.

Dari perspektif teori, hasil ini sejalan dengan Porter Hypothesis yang menyatakan bahwa regulasi lingkungan yang ketat dapat mendorong inovasi produktif dan pertumbuhan ekonomi hijau. Namun, teori tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan *inclusive growth*, agar manfaat inovasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ASEAN, integrasi kedua teori ini melahirkan paradigma baru yaitu “Inclusive Green Growth”, yakni pembangunan yang menekankan keseimbangan antara efisiensi lingkungan dan pemerataan sosial. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dan investasi publik memainkan peran penting. Negara yang memiliki kerangka regulasi kuat, seperti Vietnam dan Malaysia, lebih mampu mengubah agenda hijau menjadi peluang sosial-ekonomi. Sebaliknya, negara dengan kapasitas fiskal lemah dan tata kelola yang rapuh, seperti Myanmar dan Kamboja, cenderung tertinggal dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *green growth* dan *inclusive development* bukan dua agenda yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan SDGs di ASEAN. Fokus kebijakan ke depan harus diarahkan pada peningkatan *green investment*, transfer teknologi antarnegara, dan integrasi kebijakan sosial dalam setiap proyek pembangunan hijau agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan sekaligus inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara *green growth* dan *inclusive development* di kawasan ASEAN dengan menggunakan data sekunder dari *ASEAN Key Figures 2024*. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan korelasional terhadap sepuluh negara anggota ASEAN, dapat disimpulkan bahwa kawasan ini telah menunjukkan kemajuan nyata dalam aspek pertumbuhan ekonomi hijau dan pemerataan sosial, meskipun capaian tersebut masih belum merata antarnegara.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa *green growth* di kawasan ASEAN bergerak positif seiring dengan meningkatnya investasi energi terbarukan, perluasan akses listrik, dan penguatan kebijakan efisiensi energi. Negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Indonesia menunjukkan capaian signifikan dalam meningkatkan proporsi energi terbarukan serta memperkuat tata kelola lingkungan. Sementara Myanmar dan Lao PDR masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya teknologi, yang menghambat transformasi menuju ekonomi hijau.

Kedua, dimensi *inclusive development* juga memperlihatkan kemajuan, ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan membaiknya pemerataan pendapatan di sebagian besar negara ASEAN. Namun, ketimpangan sosial dan gender masih menjadi isu krusial di beberapa negara, khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah. Capaian pendidikan dasar yang relatif tinggi menunjukkan adanya kemajuan struktural, namun belum diikuti pemerataan akses ke pendidikan tinggi dan sektor formal yang berdaya saing.

Ketiga, hasil korelasi empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif moderat ($r = 0,67$) antara *green growth* dan *inclusive development*. Hal ini berarti negara-negara yang berhasil mengembangkan ekonomi hijau cenderung memiliki kinerja sosial yang lebih baik. Pertumbuhan hijau terbukti mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memperluas akses energi bersih, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, efek positif tersebut bergantung pada kapasitas kelembagaan, desain kebijakan nasional, serta efektivitas implementasi regulasi lingkungan dan sosial.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Porter Hypothesis dan Human Development Theory, yang menyatakan bahwa inovasi lingkungan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila diiringi kebijakan sosial yang inklusif. Dengan demikian, *green growth* dan *inclusive development* bukan dua agenda yang berdiri sendiri, melainkan dua pilar saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di ASEAN.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan empiris dan analisis konseptual, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diterapkan baik di tingkat nasional maupun regional:

1. Integrasi Kebijakan Ekonomi Hijau dan Sosial Inklusif dalam Blueprint ASEAN 2040
ASEAN perlu memperkuat integrasi lintas pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pembaruan *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2040*. Integrasi ini harus memastikan bahwa kebijakan energi hijau, efisiensi sumber daya, dan digitalisasi industri disertai mekanisme perlindungan sosial yang menjamin keadilan bagi kelompok rentan.
2. Mendorong Investasi Hijau dan Pendanaan Inklusif
Pemerintah dan lembaga keuangan regional seperti ADB dan AIIB perlu memperluas skema *green financing* dan *inclusive investment funds*. Model pembiayaan inovatif seperti *green bonds*, *blended finance*, dan *impact investment* dapat menjadi instrumen untuk menghubungkan pertumbuhan hijau dengan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

3. Penguatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Antarneegara ASEAN Negara dengan kemajuan teknologi tinggi seperti Singapura dan Malaysia dapat menjadi *hub transfer teknologi* bagi negara lain di kawasan. Kolaborasi dalam bentuk *ASEAN Green Innovation Network* perlu dikembangkan untuk mempercepat adopsi energi terbarukan, sistem pertanian berkelanjutan, dan industri rendah karbon di seluruh kawasan.
4. Implementasi Prinsip Just Transition dalam Kebijakan Energi dan Industri Transisi menuju ekonomi hijau harus menjamin keadilan sosial bagi pekerja dan masyarakat yang terdampak, khususnya di sektor energi fosil dan manufaktur tradisional. ASEAN perlu mengembangkan panduan regional tentang *just transition policy* agar transformasi ekonomi tidak memperbesar kesenjangan sosial.
5. Penguatan Data, Indikator, dan Monitoring Pembangunan Berkelanjutan Perlu dibangun sistem *ASEAN Inclusive Green Growth Dashboard* untuk memantau kemajuan tiap negara berdasarkan indikator terintegrasi: energi bersih, ketimpangan, pendidikan, dan partisipasi tenaga kerja. Mekanisme pemantauan ini akan memperkuat akuntabilitas dan membantu negara dalam menilai efektivitas kebijakan.
6. Pendidikan dan Kesadaran Publik tentang Ekonomi Hijau dan Inklusi Sosial Peningkatan literasi publik menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Kurikulum pendidikan di tingkat menengah dan tinggi dapat mengintegrasikan nilai-nilai *sustainability literacy* dan *green entrepreneurship* agar generasi muda mampu berperan sebagai agen perubahan dalam transisi ekonomi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S., & Toba, N. (2022). *Green energy investment and inclusive development in developing economies*. *Energy Policy Journal*, 156, 112–125. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112125>
- Asian Development Bank (ADB). (2020). *Framework for inclusive growth in Asia*. Manila: Asian Development Bank. <https://www.adb.org/publications/framework-inclusive-growth-asia>
- ASEAN Secretariat. (2024). *ASEAN key figures 2024*. Jakarta: ASEAN Secretariat. <https://aseanstats.org>
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Bowen, A., & Hepburn, C. (2014). *Green growth: Economic theory and political discourse*. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Working Paper. London School of Economics.
- Costanza, R., Daly, L., Fioramonti, L., Giovannini, E., Kubiszewski, I., Mortensen, L. F., Pickett, K. E., Ragnarsdóttir, K. V., De Vogli, R., & Wilkinson, R. (2016). *Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN Sustainable Development Goals*. *Ecological Economics*, 130, 350–355. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.07.009>

- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). *Economic growth and the environment*. *Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 353–377. <https://doi.org/10.2307/2118443>
- Lee, K., & Zhang, J. (2021). *Renewable energy transition and welfare improvement in ASEAN*. *Journal of Cleaner Production*, 320, 128–141. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128141>
- OECD. (2011). *Towards green growth*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264111318-en>
- OECD. (2020). *A framework for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*. Paris: OECD Publishing.
- Pearce, D. W., Markandya, A., & Barbier, E. B. (1989). *Blueprint for a green economy*. London: Earthscan Publications.
- Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). *Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship*. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97–118. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97>
- Rauniyar, G., & Kanbur, R. (2010). *Inclusive growth and inclusive development: A review and synthesis of Asian development policy*. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 455–469. <https://doi.org/10.1080/13547860.2010.516379>
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. New York: Columbia University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- UNESCAP. (2023). *Green and inclusive recovery in Asia and the Pacific*. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). <https://www.unescap.org>
- World Bank. (2023). *World development indicators 2023*. Washington, DC: The World Bank. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>